

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv s/d ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : TINDAK PIDANA KORUPSI	6
1. Pengertian Korupsi	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	9
3. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi	9
4. Kronologis Lahirnya Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	13
BAB III : TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERBANKAN PERMASALAHANNYA DAN PENANGGULANGANNYA	26
1. Tindak Pidana Korupsi di Perbankan	26
2. Penggelapan Dana Masyarakat	36
3. Penyelewengan Atau Penyalahgunaan Dana Masyarakat ..	37
4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Keuangan	39
5. Pencucian Uang (Money Laundering)	44
6. Kredit Macet Perbankan	49
▪ Pemerintah Jadi Debitur Terbesar Di Perbankan	49
▪ Daftar Kredit Macet Bank BUMN	50
▪ Bulan Juli Tahun 2003 Kredit bermasalah akan mencapai Rp 100 triliun	50
▪ Kredit Bermasalah Bank Masih Cenderung Tinggi	51
▪ Konglomerat Berada Di Balik Kredit Macet Usaha Kecil Menengah (UKM)	53
7. Likuiditas Perbankan Sudah Berlebih	54
8. Dana Rekening 502	54
▪ BPK Jelaskan Kasus Rekening 502	55
▪ Audit BPK atas dana Rekening 502 memuat sangkaan korupsi	56
▪ Daftar penyaluran dana dari rekening 502 yang bermasalah	56
9. Pelaku Utama Tindak Pidana Korupsi Di Perbankan Umumnya Dilakukan Oleh Korporasi	57
▪ Upaya penanggulangan korupsi di Perbankan yang dilakukan oleh Korporasi	59

BAB IV : KASUS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK NASIONAL ..	60
1. Kasus Badan Penyehatan Perbankan Nasional	60
▪ Pemberian Realise And Discharge Terhadap Pengusaha	62
▪ Pemberian Realise And Discharge dari Master of Settlement and Acquisition (MSSA)	63
▪ Pemberian Realise And Discharge (R&D) Tidak Menghapuskan Pidana	64
▪ Rights Issue	66
▪ Perjanjian Cessie antara Bank Bali dan P.T Era Giat Prima	67
▪ BPPN dan Biaya Krisis	67
▪ Recovery Rate 28 % Asset BPPN Sulit Dipercaya	72
▪ Akuntabilitas BPPN	73
▪ Ekonomi Indonesia Pasca Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	73
2. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	75
▪ Terjadinya Kemacetan Pengembalian Kredit BLBI	75
▪ Daftar Penyimpangan Penggunaan Dana BLBI	76
▪ Nama-nama Terdakwa Kasus Penyelewengan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	77
▪ Daftar Kasus Terdakwa BLBI Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri	79
BAB V : STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	80
1. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Perbankan	80
▪ Pembobolan di P.T Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kebayoran Baru	80
▪ Daftar Tersangka/ Saksi Pembobol L/C BNI Rp 1,7 triliun	82
▪ Pelarian dana hasil pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru ke luar negeri	82
▪ Daftar Pelarian dana BNI ke Luar negeri	83
▪ Pembobolan di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Magelang Jawa Tengah	85
▪ Kasus Pembobolan BRI sebesar Rp 925 miliar	86
▪ Kasus Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan Jakarta	87
▪ Kasus Petral Pertamina	87
▪ Kasus Pembobolan Bank Global	87
▪ Kasus Pembobolan Bank Mega	88
▪ Daftar Kasus Pembobolan Bank Tahun 2002-2003	88
▪ Daftar Kasus Korupsi di Perbankan Tahun 2004	88
2. Upaya Mencegah Pembobolan Uang di Perbankan BUMN dan Bank Swasta	89

3. Kasus Kejahatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi	91
▪ Kasus Penyimpangan APBN dan APBD	91
▪ BPK temukan indikasi KKN sebesar Rp 166,532 triliun	92
▪ Kasus Temuan BPKP Yang Diproses Tahun 2004	93
▪ Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) temukan selisih pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp 21 triliun	94
▪ Kasus Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 16 Rekening atas nama Menteri Keuangan	94
▪ Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Daerah yang Dilakukan oleh PEMDA dan DPRD	94
▪ Daftar 285 Anggota DPRD Yang Diduga Bermasalah	95
▪ Daftar Anggota DPRD Yang Diduga Bermasalah dengan Dana APBD	96
▪ Daftar Kepala Daerah yang diduga bermasalah	97
▪ Kasus Gula Ilegal	97
▪ Kasus Lelang Gula Illegal	98
▪ Kasus Proyek Pertamina Rugikan Negara Rp 11,4 triliun	98
▪ Kasus Dugaan KKN di Pertamina yang belum terungkap	99
▪ Kasus Penjualan Tanker Pertamina	99
▪ Kasus Pabrik Textil PT. Texmaco	100
▪ Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perpajakan	100
▪ Kasus Disvestasi Indosat	101
▪ Kasus Illegal Logging	101
▪ Kasus PT Arutmin Indonesia tunggak royalti penambangan batu bara Rp 200 milyar di Kalimantan Selatan	104
▪ Kasus Gubernur Kalsel Sjahriel Darham	105
▪ Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Reboisasi Proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Selatan	106
▪ Kasus Dana Investasi PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang Bermasalah	107
▪ Kasus Tunggakan Dana Reboisasi	108
▪ Daftar 16 Perusahaan HPH/HPHT Penunggak Pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Per Maret 2004	108
▪ Kasus Tersangka Tindak Pidana Korupsi penerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan	109
BAB VI : MENCERMATI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	111
1. Mencermati kelakuan oknum Hakim nakal	111
2. Daftar Nama Hakim Yang dilaporkan kepada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)	113
3. Kasus Putusan Hakim yang Kontroversial	115
▪ Kasus Akbar Tanjung	115
4. Vonis bebas atau ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan	117
▪ Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi yang sudah dijatuhi vonis Pengadilan	118

5. Tindakan Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Oknum Hakim Yang Menyalahgunakan Kekuasaannya Dalam Mengadili Suatu Perkara	118
▪ Tindakan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum	118
▪ Pengawasan Mahkamah Agung terhadap Keputusan Hakim	119
▪ Jaksa Agung dapat menangkap atau menahan Hakim Agung	120
▪ Ketua Mahkamah Agung dapat memberhentikan Hakim Agung apabila ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya	121
▪ Tindakan Hukum lainnya yang dapat diberlakukan atas Oknum Hakim nakal	121
▪ Pengawasan Mahkamah Agung terhadap Hakim di seluruh Indonesia	122
▪ Kasus Koruptor Yang Kabur Keluar Negeri Dalam Proses Menunggu Putusan Banding dan Kasasi	123
▪ Pengawasan Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan oleh Mahkamah Agung	125
▪ Kasus Hakim Manulife	125
▪ Kasus Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan PP 110 Tahun 2000	126
▪ Ketua Mahkamah Agung mengakui adanya hakim yang nakal	128
▪ Analisis Yuridis Tentang Asas Retro Aktif	129
6. Komentar atas Vonis Hakim Penjara Seumur Hidup Terhadap Adrian Herling Waworuntu	130

BAB VII : STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI	133
1. Menutup celah-celah peraturan perundang-undangan yang berpotensi dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari tuntutan hukum atau melarikan diri keluar negeri	135
▪ Mengamandemen Undang Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia	135
▪ Revisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 136	
▪ Amandemen Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal Pasal tentang Pembuktian Terbalik	137
2. Strategi Memberi Efek Jera Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi	138
3. Menutup Celah-celah Hukum yang berpotensi mengundang Korporasi atau seseorang melakukan TIPIKOR di bidang Perbankan	139
▪ Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum	139
▪ Kredit Tambahan Modal	140
▪ Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank BUMN	140

▪ Rasio Kecukupan Modal (CAR)	141
▪ Letter of Credit (L/C)	141
▪ Permohonan Kredit Modal atau Permohonan Penerbitan L/C	141
▪ Penerbitan Obligasi oleh Bank Swasta	141
4. Celah Peraturan perundangan lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan KKN	141
▪ Tukar guling (ruilslag) penjualan rumah jabatan, tanah negara dan mobil dinas para pejabat	141
▪ Belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Teknis Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004	142
▪ Adanya Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan APBN/APBD yang membenarkan penunjukan langsung tanpa tender	142
▪ Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	143
▪ Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Izin Operasi Tambang di Hutan Lindung	143
5. Rekrutmen Aparatur Pemerintah yang bersih dari KKN	144
▪ Penindakan Hakim nakal	144
▪ Reward terhadap Anggota Polri dan Jaksa	144
▪ Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, dan Komisi Yudisial	145
▪ Penempatan Pejabat Negara/ Aparatur Pemerintah	145
▪ Pembinaan Pegawai Negeri/ Aparatur Negara	145
▪ Sanksi terhadap Pejabat Pemerintah /Aparatur Negara	146
6. Untuk Mempercepat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Pula Upaya Berupa:	146
▪ Cara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Top Down	146
▪ Cara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bottom Up	146
▪ Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	147
▪ Menindaklanjuti Hasil Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)	148
▪ Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	148
▪ Transparansi Pelaksanaan APBN dan APBD	151
▪ Transparansi Neraca Rugi & Laba Perusahaan BUMN dan BUMD	151
▪ Peranan Pengawasan DPR RI dan DPRD I & II	152
▪ Stop Fasilitas Mewah Aparatur Pemerintah BUMN dan BUMD	152
LAMPIRAN :	
Lampiran I : Undang-Undang Dasar 1945 RI Hasil Amandemen (Pertama 1999 S/D Keempat 2002) beserta Penjelasan UUD 1945 dan Piagam Jakarta	154

Lampiran II : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasannya 196

DAFTAR PUSTAKA 205